

LAPORAN AKHIR
HIBAH PENELITIAN INTERNAL

KARAKTERISTIK BADAN USAHA MILIK DESA PADA PESISIR
KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN MALUK
SUMBAWA BARAT



Disusun Oleh :

Dr. Ibrahim, M.Sc
Mas'ad, S.Pd., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
APRIL 2020

**LAPORAN AKHIR
HIBAH PENELITIAN INTERNAL**

**KARAKTERISTIK BADAN USAHA MILIK DESA PADA PESISIR
KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN MALUK
SUMBAWA BARAT**



Tim Peneliti
Dr. Ibrahim, M.Sc
Mas'ad, S.Pd, M.Si

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
APRIL 2020**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HIBAH INTERNAL

Judul Penelitian : Karakteristik Badan Usaha Milik Desa
Pada Pesisir Kawasan Pertambangan Emas
Di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat

Nama lengkap : Dr. Ibrahim, M.Sc
NIDN : 0810067802
Jabatan Fungsional : Lektor IIIC
Program Studi : Pendidikan Geografi
Nomor HP : 08123721924
Alamat email : ibrahimali.geo@gmail.com
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Mataram

Anggota 1

Nama Lengkap : Mas'ad
NIDN : 0831126439
Jabatan Fungsional : Lektor IIIC
Program Studi : Pendidikan Geografi
Nomor HP : 081903705318
Alamat email : hjiril_risa@yahoo.co.id

Anggota 2

Nama Lengkap : -
NIDN : -
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : -
Nomor HP : -
Alamat email : -
Jumlah Mahasiswa : 2 orang
Jumlah Dana Penelitian: Rp. 6.000.000

Mataram, 30 April 2020

Mengetahui,
Ketua EPPM UMMat



H. Syahrir Idris, MA., Ph.D
NIDN. 0030017202

Ketua,

Dr. Ibrahim Ali, M.Sc
NIDN. 0810067802

RINGKASAN PENELITIAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai aset ekonomi berada di desa dengan Pengelolaan sepenuhnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik badan usaha milik desa pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluku Sumbawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik BUMDes pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan organisasi dalam kategori tertinggi pada level rendah mencapai 61,8 persen, program BUMDes pada kategori tertinggi pada level terendah mencapai 61,79 persen dan sumberdaya pengelola pada kategori tertinggi pada level terendah mencapai 61,79 persen. Keberadaan BUMDes ditengah masyarakat diperlukan kemitraan dengan semua pihak, sehingga organisasi, program dan pengelola sumberdaya dapat meningkat serta berdaya saing. Luaran pada Jurnal Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) LIPI Sinta 2 (Submitted)

Kata Kunci: Karakteristik, BUMDes, Pesisir dan Kemitraan

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul Penelitian	1
Halaman Pengesahan	2
Ringkasan Penelitian	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan	5
Bab 2. Tinjauan Pustaka	7
Bab 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
Bab 4. Metode Penelitian	10
Bab 5. Hasil dan Luaran yang Dicapai	13
Bab 6. Kesimpulan	18
Daftar Pustaka	19
Dokumentasi	20
Draf Publikasi	23

DAFTAR ISI

		Hal
Sampul Penelitian		
Halaman Pengesahan		
Ringkasan Penelitian		
Daftar Isi		
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
Daftar Lampiran		
Bab 1.	Pendahuluan	
Bab 2.	Tinjauan Pustaka	
Bab 3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	
Bab 4.	Metode Penelitian	
Bab 5.	Hasil dan Luaran yang Dicapai	
Bab 6.	Kesimpulan	
Daftar Pustaka		
Draft Wawancara (bagi yang memakai)		
Surat Penelitian		
Dokumentasi		

BAB 1

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat dengan (BUMDes) berperan sebagai media masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Desa dan Masyarakat (Ibrahim, 2018). Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi diharapkan mampu membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

BUMDes memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 menyatakan bahwa BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUMDes khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun ke tahun dirincikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk dan persentase miskin Kabupaten Sumbawa Barat

Uraian	Jumlah	Persentase
	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin
(Tahun)	(Orang)	(%)
2012	21.724	17,61
2013	21.710	17,10
2014	22.710	16,87
2015	22.500	16,97
2016	22.470	16,50
2017	22.330	15,96
2018	20.360	14,17

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa Barat, 2019

Dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, kehadiran BUMDes diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan sebagai alternative dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Ibrahim (2018) menyatakan bahwa Pelaksanaan program BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di sekitar kawasan pertambangan emas sudah berjalan, namun masih belum optimal dalam meningkatkan perubahan pada sasaran ekonomi masyarakat dan belum mencapai tujuan utama sebagai peranan dalam meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya dilakukan penelitian mengenai karakteristik BUMDes Daerah pesisir kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik BUMDes Daerah pesisir kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat
2. Bagaimana strategi pengembangan BUMdes Daerah pesisir kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administratif. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu (Kartasasmita, 1996)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, Tanpa tahun).

Menurut Dewi (2014) menjelaskan bahwa BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang

ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.¹² Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil) c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).

Pengembangan penelitian ini dapat dilihat pada fishbone berikut.



BAB III.

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis karakteristik BUMDes Daerah pesisir kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluku Sumbawa Barat
2. untuk menganalisis strategi pengembangan BUMdes Daerah pesisir kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluku Sumbawa Barat

BAB IV

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, situasi kondisi, pemikiran dan suatu klas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, sistematis, factual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena- fenomena yang diselidiki, dianalisis dan kemudian menyimpulkan (Nazir, 2009).

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 dan bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Alat

1. Leptop
2. Recorder
3. Kameradan
4. ATK

3.3.1 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuisisioner.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Tekhnik Observasi

Menurut (Sugiyono, 2006) pengambilan data dengan teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan cara melihat langsung kondisi karakteristik dan program BUMDes yang berada di luar Kawasan Tambang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4.2 Wawancara

Pengambilan data dengan teknik wawancara merupakan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, Menurut (Sugiono, 2006) wawancara terstruktur adalah dilakukan dengan menggunakan daftar kuisisioner yang ada.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) suatucara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Penentuan Responden

Responden yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Maluk yang berdekatan langsung dengan pesisir pantai yaitu: Desa Pasir Putih dan Desa Benete.

Tabel 1.2 Jumlah rumah tangga Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Responden
1	Benete	636	32
2	Pasir Putih	1.065	54
Jumlah			86

Sumber: BPS Sumbawa Barat (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah rumah tangga yang dijadikan sebagai responden ditentukan dengan menggunakan proporsional, masing-masing desa/kelurahan diambil sebanyak 5%, sehingga jumlah responden yang diambil sebanyak 86 orang dengan rincian: Desa Benete 32 orang dan Desa Pasir Putih 54 orang.

3.6 Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2011) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Tabulasi silang

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Karakteristik BUMDes Pesisir

Desa tertinggal identik dengan desa pesisir, namun karena usaha warga desa pesisir melihat peluang usaha yang ada dan atas bantuan pemerintah akhirnya desa pesisir bisa memiliki perekonomian yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Peluang usaha desa yang sesuai dan cocok banyak di sekitar desa sebagai potensi unggulan desa. Peluang usaha itu tidak nampak atau tidak di sadari. Melihat peluang usaha dan memanfaatkan potensi di desa yang letaknya di pesisir ini, tentunya hal ini akan sangat berguna dan sangat membantu desa dan masyarakat.

Keberadaan BUMDes sebagai Lembaga ekonomi terdekat dengan masyarakat. BUMDes akan berperan aktif dalam mendukung ekonomi desa terutama dengan membeli hasil laut dan hasil bumi masyarakat. BUMDes pesisir pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat memiliki karakteristik secara rinci pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Organisasi

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.8
Sedang	4	4.5
Tinggi	30	33.7
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa persebaran karakteristik BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas berdasarkan pada factor organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,8 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberadaan organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,8 persen. Keberadaan organisasi sebagai pengemban utama maju dan mundurnya organisasi BUMDes di tengah masyarakat perdesaan.

Keberadaan organisasi BUMDes pada Kawasan pertambangan kenyataan belum mampu memberikan manfaat pada factor keberadaan organisasi ditengah masyarakat desa. Keberadaan BUMDes memiliki kelemahan dalam pelaksanaan terutama rendahnya sumberdaya manusia pengelola dan terbatasnya anggaran dalam mengembangkan usaha. Factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing (Ali и съавт., 2019)

Keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, ssehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja(Berlian Ramadana & Ribawanto, 1068).

Selain factor tersebut masih rendahnya kemampuan organisasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai penerima dampak BUMDes. Pola pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes adalah 1) melalui pola mitra, 2) pendapatan masyarakat, dan 3) lapangan kerja. Keberadaan program BUMDes sudah berjalan, tetapi memiliki kelemahan di bidang pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola kemitraan yang berkelanjutan dengan semua pihak, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan yang berkepanjangan (Ibrahim, Mintasrihardi, Kamaluddin, Mas'Ad, & Syukuriadi, 2020).

Berbeda dengan keberdaan program BUMDes masih belum berjalan maksimal. Masih ada desa yang baru mendirikan BUMDes pun BUMDes yang sudah terbentuk, belum seluruhnya yang berjalan dengan lancar. Hal ini karena kurang pahamnya pemerintah desa berkitan dengan tata kelola BUMDes. Kondisi ini diperkuat pada data Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Program

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.79
Sedang	4	4.5
Tinggi	30	33.7
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa persebaran program BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,79 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberadaan program tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,79 persen.

Keberadaan program sebagai tulang punggung dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Program berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes (Tama & Yanuardi, 2013).

Keberadaan program BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas belum mampu memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat. Kondisi masih terbatasnya kreatifitas pengelola dalam mengembangkan program. partisipasi masyarakat dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes memiliki tingkat partisipasi rendah. Faktor internal yang memiliki hubungan dengan partisipasi adalah tingkat pendapatan. Faktor eksternal dengan tingkat partisipasi memiliki hubungan yang kuat yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana. Penelitian ini pun menemukan bahwa tingkat efektivitas program tergolong rendah. Tingkat partisipasi dengan tingkat efektivitas program yang memiliki hubungan adalah tujuan program (Satia & Sadono, 2019). Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing. (Ali и съавт., 2019).

Keberadaan program BUMDes harus didukung sumberdaya berasal dari pengelola BUMDes. Selain keunggulan dan kekuatan yang dimiliki, BUMDes juga menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek pendirian, kelembagaan, fasilitas, sumberdaya manusia, manajemen, dan finansial. Arah kebijakan pengembangan BUMDes diharapkan dapat kuat secara internal dan mapan secara eksternal baik melalui kerjasama maupun sinkronisasi program BUMDes dengan program pemerintah.

Peran berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat dan menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Daya dukung sumberdaya pada masyarakat dalam bersaing ditengah ekonomi global saat ini. Keberhasilan BUMDes pesisir kawasan pertambangan emas pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sumber Daya Pengelola

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.79
Sedang	6	6.74
Tinggi	28	31.46
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa sumberdaya pengelola BUMDes tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,79 persen, Tinggi mencapai 28 atau 31,46 persen dan sedang mencapai 6 atau 6,74 persen. Keberdaan sumberdaya pengelola tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebsar 61,79 persen.

Selain faktor sumber daya alam dan potensi ekonomi desa menjadi penting sebagai modal utama untuk mnegmbang program berbasis pada kearifan local. tentu menjadi sangat penting adalah keberadaan Sumber Daya Manusia pengelola yang mampu dan memiliki pengetahuan cukup mengenai Badan usaha Milik Desa. Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama yang akan menjalankan BUMDes, karenanya tidak boleh diisi oleh sembarang orang, harus benar-benar individu yang memiliki kapasitas dalam menjalankan usaha. Adanya komitmen

kuat antara seluruh stakeholder untuk meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDes (Hekmatyar & Nugroho, 2018).

sdfs

Rendahnya Tingkat Pendidikan masyarakat, Kurangnya Ketersediaan sumber daya manusia, Terjadinya perbedaan kepentingan diantara warga masyarakat (Djaha, 2017). Selain itu, pengembangan BUMDes adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUMDes. Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi disepulatan elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUMDes, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas (Jaya & Rafi, 2019).

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Karakteristik badan usaha milik desa pesisir pada kawasan pertambangan emas masih memiliki tingkat organisasi, program dan sumberdaya pengelola BUMDes masih rendah.
2. Keberadaan BUMDes ditengah masyarakat diperlukan kemitraan dengan semua pihak, sehingga organisasi, program dan pengelola sumberdaya dapat meningkat serta berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.23464>
- Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. *Jurnal Publiciana*.
- Berlian Ramadana, C., & Ribawanto, H. (1068). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*.
- Djaha, Z. A. (2017). Desain Model Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V1i2.398>
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.24235/Amwal.V6i1.255>
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro. *Sosio Konsepsia*. <https://doi.org/10.33007/Ska.V7i3.1444>
- Ibrahim, Mintasrihardi, Kamaluddin, Mas'ad, & Syukuriadi. (2020). Community Empowerment Pattern Through Village-Owned Enterprise Strategy In The Gold Mine Area Of West Sumbawa, Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/413/1/012036>
- Jaya, R., & Rafi, M. (2019). Analisis Hambatan Dalam Pengembangan Bum Desa. *Jurnal El-Riyasah*. <https://doi.org/10.24014/Jel.V9i1.6823>
- Kusnadi. (2010). Budaya Masyarakat Nelayan. *Jelajah Budaya*.
- Muhi, A. H. (2011). Fenomena Pembangunan Desa. *Institute Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salinan Undang - Undang No 6 Tahun 2014*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Satia, S. R., & Sadono, D. (2019). Partisipasi Dan Efektivitas Pengembangan Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir Bumdes Di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*. <https://doi.org/10.29244/Jskpm.2.6.783-792>
- Tama, D. O. E., & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Journal Of Chemical Information And Modeling*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka

- Dewi, Amalia Sri Kusuma, 2014, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari
- Ibrahim, M.Baiquni, S. Ritohardoyo dan Setiadi, 2015, Persebaran Tingkat Kemiskinan Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat, *Prosiding Seminar Nasional Kebumian VIII*, ISBN: 978-602-73595-0-5
- Ibrahim, M.Baiquni, S. Ritohardoyo dan Setiadi, 2016, Analysis Of The Factors Affecting The Poverty In Rural Areas Around Gold Mine Areas In West Sumbawa Regency, *Journal Of Degraded And Mining Land Management*, ISSN: 2339-076X, (e) 2502-2458, (p) Vol. 3 No. 3, April 2016: 585-594, DOI: 10.15243/jdmlm.2016.033.585
- Ibrahim. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang. Yogyakarta: LeutikaPrio
- Kamaroesid Herry, Tanpa tahun, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana media), h.2.
- Kartasasmita, Ginandjar Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2006.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2015.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Stakeholfer



Gambar 2. Wawancara dengan Stakeholfer



Gambar 3. Wawancara dengan pengelola BUMDES



Gambar 4. Wawancara dengan pengelola BUMDES



Gambar 5. Wawancara dengan

Gambar 6. Wawancara dengan

Stakeholfer

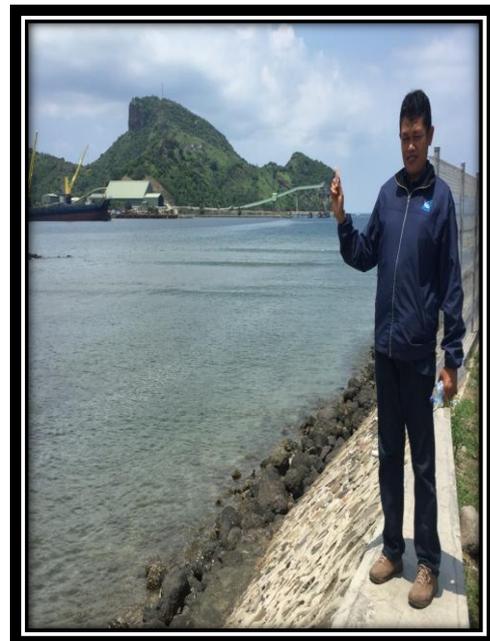


Gambar 7. Wawancara dengan Responden

Stakeholfer



Gambar 8. Penunjukan lokasi PT. AMNT sebagai lokasi Kawasan Tambang



Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 22 No. 2 Tahun 2020

KARAKTERISTIK BADAN USAHA MILIK DESA PESISIR PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN MALUK SUMBAWA BARAT

Ibrahim¹, Kamaluddin² dan Mas'ad³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 831273

E-mail: ibrahimali.geo@email.com

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai aset ekonomi berada di desa dengan Pengelolaan sepenuhnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik badan usaha milik desa pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik BUMDes pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan organisasi dalam kategori tertinggi pada level rendah mencapai 61,8 persen, program BUMDes pada kategori tertinggi pada level terendah mencapai 61,79 persen dan sumberdaya pengelola pada kategori tertinggi pada level terendah mencapai 61,79 persen. Keberadaan BUMDes ditengah masyarakat diperlukan kemitraan dengan semua pihak, sehingga organisasi, program dan pengelola sumberdaya dapat meningkat serta berdaya saing.

Kata Kunci: Karakteristik, BUMDes, Pesisir dan Kemitraan

Latar Belakang

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Keberadaan desa sebagai tulang punggung pembangunan dari bawah. Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang (Muhi, 2011).

Masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa. Demikian pula sering iita jumpai mata pencaharian di desa makin bervariasi

sementara kultur dan tata nilai serta daya dukung lahan cenderung tetap. Begitu juga budaya dan sistem religi masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Untuk itulah masyarakat desa selalu menarik untuk didalami (Angkasawati, 2015).

Secara khusus desa pesisir memiliki karakteristik antara lain: 1) desa pesisir tipe bahan makanan, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai petani sawah; 2) desa pesisir tipe tanaman industri, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tanaman industri; 3) desa pesisir tipe nelayan/empang, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, dan pembudidaya perairan; dan 4) desa pesisir tipe niaga dan transportasi, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai pedagang antarpulau dan penyedia jasa transportasi antar wilayah (Kusnadi, 2010).

Kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. 3 tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Fatmasari, 2016). Pada sektor sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan khususnya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Nursetiawan, 2018).

Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes akan dapat mendorong dibukanya usaha baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran (Ali, Sutarna, Abdullah, Kamaluddin, & Mas'ad, 2019).

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang memiliki 57 desa dengan keberadaan BUMDes sedang berkembang. Banyak potensi desa yang dimiliki desa diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan BUMDes di masa depan. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan warga masyarakat.

BUMDES pada perdesaan kawasan pertambangan emas belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDES yang ada. BUMDES Kawasan pertambangan emas memiliki Kelemahan : a) Sumberdaya Manusia pengelola dan b) rencana usaha rendah.

Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program BUMDes menuju ekonomi berkembang

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik Badan Usaha Milik Desa Pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat.

Metode

Ruang lingkup penelitian ini termasuk tingkat meso yakni mencakup kabupaten, dan desa administratif di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unit analisis dan tingkat mikro menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *survey*. Data untuk analisis desa tingkat meso menggunakan data sekunder. Analisis mikro menggunakan data primer dengan rumah tangga sebagai unit analisis. Data primer dikumpulkan dari sampel rumah tangga yang ditentukan menggunakan *proportional sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Pengambilan data dalam penelitian ini di fokuskan pada desa pesisir pada Kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat.

Pada tingkat meso pemilihan sampel desa pada desa dari lokasi penelitian dilakukan secara *purposive random sampling*. Pemilihan Desa Pasir Putih dan Desa Benete. Kajian pada tingkat mikro dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga yang diwakili oleh Kepala Keluarga [KK] sebagai responden. Pelaksanaan penentuan sampel responden menggunakan tehnik *proportional random sampling*.

Tabel 1. Desa, Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Responden
1	Benete	636	33
2	Pasir Putih	1.065	56
Jumlah			89

Sumber : Analisis Data Sekunder, 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa populasi setiap sampel desa terpilih berdasarkan pada *proportional Random sampling*. Penentuan sampel responden rumah tangga menggunakan sampel sebesar 5 persen. Persebaran responden pada lokasi penelitian berdasarkan jumlah populasi (rumah tangga). Jumlah sampel responden pada masing-masing lokasi penelitian sebanyak 89 responden. Analisis yang digunakan untuk menguji tujuan tersebut menggunakan analisis frekuensi dan tabulasi silang

Temuan dan Diskusi

Karakteristik BUMDes Pesisir

Desa tertinggal identik dengan desa pesisir, namun karena usaha warga desa pesisir melihat peluang usaha yang ada dan atas bantuan pemerintah akhirnya desa pesisir bisa memiliki perekonomian yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Peluang usaha desa yang sesuai dan cocok banyak di sekitar desa

sebagai potensi unggulan desa. Peluang usaha itu tidak nampak atau tidak di sadari. Melihat peluang usaha dan memanfaatkan potensi di desa yang letaknya di pesisir ini, tentunya hal ini akan sangat berguna dan sangat membantu desa dan masyarakat.

Keberadaan BUMDes sebagai Lembaga ekonomi terdekat dengan masyarakat. BUMDes akan berperan aktif dalam mendukung ekonomi desa terutama dengan membeli hasil laut dan hasil bumi masyarakat. BUMDes pesisir pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat memiliki karakteristik secara rinci pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Organisasi

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.8
Sedang	4	4.5
Tinggi	30	33.7
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa persebaran karakteristik BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas berdasarkan pada factor organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,8 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberadaan organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,8 persen. Keberadaan organisasi sebagai pengemban utama maju dan mundurnya organisasi BUMDes di tengah masyarakat perdesaan.

Keberadaan organisasi BUMDes pada Kawasan pertambangan kenyataan belum mampu memberikan manfaat pada factor keberadaan organisasi ditengah masyarakat desa. Keberadaan BUMDes memiliki kelemahan dalam pelaksanaan terutama rendahnya sumberdaya manusia pengelola dan terbatasnya anggaran dalam mengembangkan usaha. Factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing (Ali и съавт., 2019)

Keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja (Berlian Ramadana & Ribawanto, 1068).

Selain factor tersebut masih rendahnya kemampuan organisasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai penerima dampak BUMDes. Pola pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes adalah 1) melalui pola mitra, 2) pendapatan masyarakat, dan 3) lapangan kerja. Keberadaan program BUMDes sudah berjalan, tetapi memiliki kelemahan di bidang pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola kemitraan yang berkelanjutan dengan semua pihak, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan yang berkepanjangan (Ibrahim, Mintasrihardi, Kamaluddin, Mas'Ad, & Syukuriadi, 2020).

Berbeda dengan keberadaan program BUMDes masih belum berjalan maksimal. Masih ada desa yang baru mendirikan BUMDes pun BUMDes yang sudah terbentuk, belum seluruhnya yang berjalan dengan lancar. Hal ini karena kurang pahamnya pemerintah desa berkitan dengan tata kelola BUMDes. Kondisi ini diperkuat pada data Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Program

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.79
Sedang	4	4.5
Tinggi	30	33.7
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa persebaran program BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,79 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberadaan program tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,79 persen.

Keberadaan program sebagai tulang punggung dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Program berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes (Tama & Yanuardi, 2013).

Keberadaan program BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas belum mampu memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat. Kondisi masih terbatasnya kreatifitas pengelola dalam mengembangkan program. partisipasi masyarakat dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes memiliki tingkat partisipasi rendah. Faktor internal yang memiliki hubungan dengan partisipasi adalah tingkat pendapatan. Faktor eksternal dengan tingkat partisipasi memiliki hubungan yang kuat yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana. Penelitian ini pun menemukan bahwa tingkat efektivitas program tergolong rendah. Tingkat partisipasi dengan tingkat efektivitas program yang memiliki hubungan adalah tujuan program (Satia & Sadono, 2019). Diperlukan kerja keras

pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing. (Ali и съавт., 2019).

Keberadaan program BUMDes harus didukung sumberdaya berasal dari pengelola BUMDes. Selain keunggulan dan kekuatan yang dimiliki, BUMDes juga menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek pendirian, kelembagaan, fasilitas, sumberdaya manusia, manajemen, dan finansial. Arah kebijakan pengembangan BUMDes diharapkan dapat kuat secara internal dan mapan secara eksternal baik melalui kerjasama maupun sinkronisasi program BUMDes dengan program pemerintah.

Peran berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat dan menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Daya dukung sumberdaya pada masyarakat dalam bersaing ditengah ekonomi global saat ini. Keberhasilan BUMDes pesisir kawasan pertambangan emas pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sumber Daya Pengelola

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.79
Sedang	6	6.74
Tinggi	28	31.46
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa sumberdaya pengelola BUMDes tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,79 persen, Tinggi mencapai 28 atau 31,46 persen dan sedang mencapai 6 atau 6,74 persen. Keberadaan sumberdaya pengelola tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,79 persen.

Selain faktor sumber daya alam dan potensi ekonomi desa menjadi penting sebagai modal utama untuk mnegmbang program berbasis pada kearifan local. tentu menjadi sangat penting adalah keberadaan Sumber Daya Manusia pengelola yang mampu dan memiliki pengetahuan cukup mengenai Badan usaha Milik Desa. Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama yang akan menjalankan BUMDes, karenanya tidak boleh diisi oleh sembarang orang, harus benar-benar individu yang memiliki kapasitas dalam menjalankan usaha. Adanya komitmen kuat antara seluruh stakeholder untuk meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDes (Hekmatyar & Nugroho, 2018).

sdfs

Rendahnya Tingkat Pendidikan masyarakat, Kurangnya Ketersediaan sumber daya manusia, Terjadinya perbedaan kepentingan diantara warga masyarakat (Djaha, 2017). Selain itu, pengembangan BUMDes adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUMDes. Faktor

komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi disepertaran elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUMDes, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas (Jaya & Rafi, 2019).

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Karakteristik badan usaha milik desa pesisir pada kawasan pertambangan emas masih memiliki tingkat organisasi, program dan sumberdaya pengelola BUMDes masih rendah.
2. Keberadaan BUMDes ditengah masyarakat diperlukan kemitraan dengan semua pihak, sehingga organisasi, program dan pengelola sumberdaya dapat meningkat serta berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai penyandang dana hibah penelitian tahun 2019/2020. Pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian dilapangan Bappeda dan Litbang Sumbawa Barat, BPMD KSB, Desa Se-Kecamatan Maluk Pengelola BUMDes dan masyarakat.

Referensi

- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.23464>
- Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. *Jurnal Publiciana*.
- Berlian Ramadana, C., & Ribawanto, H. (1068). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*.
- Djaha, Z. A. (2017). Desain Model Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V1i2.398>
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.24235/Amwal.V6i1.255>
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro. *Sosio Konsepsia*. <https://doi.org/10.33007/Ska.V7i3.1444>
- Ibrahim, Mintasrihardi, Kamaluddin, Mas'ad, & Syukuriadi. (2020). Community Empowerment Pattern Through Village-Owned Enterprise Strategy In The Gold Mine Area Of West Sumbawa, Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*.

- <https://doi.org/10.1088/1755-1315/413/1/012036>
- Jaya, R., & Rafi, M. (2019). Analisis Hambatan Dalam Pengembangan Bum Desa. *Jurnal El-Riyasah*. <https://doi.org/10.24014/Jel.V9i1.6823>
- Kusnadi. (2010). Budaya Masyarakat Nelayan. *Jelajah Budaya*.
- Muhi, A. H. (2011). Fenomena Pembangunan Desa. *Institute Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salinan Undang - Undang No 6 Tahun 2014*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Satia, S. R., & Sadono, D. (2019). Partisipasi Dan Efektivitas Pengembangan Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir Bumdes Di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*. <https://doi.org/10.29244/Jskpm.2.6.783-792>
- Tama, D. O. E., & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Journal Of Chemical Information And Modeling*. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>